



KADIN *NEWS*

VOL. 13 | AGUSTUS 2024



Borneo Economic Forum 2024: Mewujudkan Potensi Kalimantan sebagai Pusat Ekonomi Baru dan Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN

Musyawarah Provinsi Kadin
di Kalimantan Barat dan
Jakarta: Konsistensi Dalam
Penguatan Institusi Kadin di
Daerah

Dukung Pertumbuhan Ekonomi
8%, Kadin Indonesia Gelar Sesi
FGD untuk Menampung Masukan
Industri bagi White Paper Usulan
Arah Pembangunan Ekonomi
2024-2029

Launching Laporan Artificial
Intelligence Kolaborasi Kadin
Indonesia, AC Ventures, dan
BCG-X

Daftar Isi

SOROTAN BULANAN

01	Sambutan Ketua Umum Kadin Indonesia	Manfaat Keanggotaan Kadin	49
03	Penyusunan White Paper Kadin	Cara Pendaftaran Anggota Kadin	50
20	FGD/Seminar	Fitur Terbaru Website Kadin	51
23	Program Pengurus	Kabar Terkini: Akselerasi Transisi Energi, TKDN Proyek EBT Disiapkan	52
30	Kegiatan Bersama dengan Kementerian/Lembaga/Asosiasi/Media	Inisiatif Kadin Indonesia: Kadin for Naker	54
36	Kunjungan Internasional	Inisiatif Kadin Indonesia: Wiki Export	55
38	Penandatanganan Nota Kesepahaman	Inisiatif Kadin Indonesia: Kadin Net Zero Hub	56
39	Ayo Berkadin!	Inisiatif Kadin Indonesia: TRADE	57
41	Special Section Musyawarah Provinsi VII Kadin Provinsi Kalimantan Barat		
42	Special Section Musyawarah Provinsi XIV Kadin Provinsi DKI Jakarta		
43	Special Section Rapat Koordinasi Wilayah Kalimantan dan Borneo Economic Forum		
44	Special Section Borneo Economic Forum		
45	Special Section Rapimprov dan Forum Bisnis 2024 Kadin Provinsi Maluku		
46	Special Section Asean Zero Emissions Community (AZEC)		

SAMBUTAN KETUA UMUM

Kadin Indonesia



Borneo Economic Forum 2024 dan Rapat Koordinasi Wilayah Kalimantan 2024 merupakan dua acara strategis yang bertujuan untuk menggali potensi Kalimantan sebagai pusat ekonomi baru di ASEAN serta memperkuat komitmen Kadin Indonesia dalam mendukung pemerataan pembangunan nasional.

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Shalom, Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan, Salam sejahtera bagi kita semua

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya yang senantiasa mengiringi langkah Kadin Indonesia dalam memajukan dunia usaha di negeri ini.

Dengan penuh rasa bangga dan hormat, saya menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus, anggota, dan tim Sekretariat Kadin Indonesia atas kerja keras dan dedikasinya dalam menjalankan program strategis. Terima kasih atas komitmen dan kerja sama luar biasa yang telah memperkuat Kadin Indonesia sebagai garda terdepan dunia usaha.

Tidak terasa kita sudah memasuki semester kedua di tahun 2024. Sepanjang bulan Agustus ini, Kadin Indonesia terus melaksanakan berbagai program penting. Borneo Economic Forum 2024 dan Rapat Koordinasi Wilayah Kalimantan 2024 merupakan dua acara strategis yang bertujuan untuk menggali potensi Kalimantan sebagai pusat ekonomi baru dan pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Melalui forum ini, harapannya kita tidak hanya memperkuat perekonomian di wilayah tersebut, tetapi juga menunjukkan komitmen Kadin Indonesia dalam mendukung pemerataan pembangunan nasional.

Kadin Indonesia juga telah menyelenggarakan serangkaian Focus Group Discussion (FGD) untuk menyusun White Paper Usulan Arah Pembangunan Ekonomi 2024-2029. Langkah ini bertujuan mengumpulkan aspirasi dunia usaha dan bersinergi dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan dan stabilitas nasional.

Tidak hanya itu, Musyawarah Provinsi VII Kadin Provinsi Kalimantan Barat dan Musyawarah Provinsi XIV Kadin Provinsi DKI Jakarta juga telah berhasil diselenggarakan. Selain merupakan perwujudan dari komitmen untuk meningkatkan profesionalitas institusi, kedua acara ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara dunia usaha dan pemerintah dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Di Kalimantan Barat, program kerja mengangkat tema pengembangan potensi lokal sebagai kontribusi terhadap pembangunan nasional. Sementara di Jakarta, program kerja mengangkat tema peran strategis kota ini sebagai pusat ekonomi global yang harus terus diperkuat.

Sebagai penutup, saya berharap kita semua tetap berkomitmen menyelesaikan program prioritas, menjalankan peran Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah bagi pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Mari kita terus bekerja dengan semangat, gotong royong, menjaga komitmen pada konstitusi untuk mencapai tujuan bersama.

Salam,

M. Arsjad Rasjid P. M.

Ketua Umum Kadin Indonesia

Sorotan Kegiatan **Bulan Ini**



MEETING
PENGURUS BIDANG



MEETING DENGAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA



AUDIENSI



EVENT



ANGGOTA BARU



ANGGOTA YANG
MEMPERPANJANG KTA



PENANDATANGANAN
NOTA KESEPAHAMAN DAN
PERJANJIAN KERJA SAMA



KUNJUNGAN
INTERNASIONAL



Penyusunan White Paper Kadin Usulan Arah Pembangunan Ekonomi 2024-2029

PENYUSUNAN WHITE PAPER KADIN

Rangkaian FGD Kadin Indonesia: Wujud Proses Advokasi Terkait Penyusunan White Paper Usulan Arah Pembangunan 2024-2029

Dalam rangka mendukung Presiden terpilih Prabowo Subianto mencapai visi pertumbuhan 8% dan Indonesia Emas 2045, Kadin Indonesia menyusun White Paper Usulan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional Pembangunan Ekonomi 2024-2029. Sebagai satu-satunya organisasi yang mewakili dunia usaha, Kadin senantiasa berkomitmen memberikan kontribusi nyata dalam menjalankan mandat UU Kadin No.1 Tahun 1987 untuk melakukan advokasi kebijakan ekonomi, khususnya dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Penyusunan dokumen ini menerapkan prinsip gotong royong dan kolaborasi, dengan prinsip *no one left behind*, guna memastikan seluruh anggota Kadin dapat berpartisipasi aktif.

Kadin Indonesia melibatkan para pengurus, Kadin Daerah (khususnya Provinsi), Asosiasi dan ALB untuk berpartisipasi dalam penyusunan White Paper khususnya dalam memberikan masukan lewat rangkaian *Focus Group Discussion* (FGD) dari berbagai bidang, survei, serta penerimaan hasil kajian dari sektoral.

Memperkuat Landasan Ekonomi Melalui Sektor Konstruksi, Infrastruktur, dan Properti

Sebagai bentuk upaya lanjutan mengembangkan fondasi strategis bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang, Kadin Indonesia mengadakan Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema sektor konstruksi, infrastruktur, dan properti di Menara Kadin Indonesia, pada 13 Agustus 2024.

FGD dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Dan Infrastruktur, Insannul Kamil, serta dihadiri juga oleh Wakil Ketua Umum Bidang Agraria, Tata Ruang, dan Kawasan Industri, Sanny Iskandar, serta diikuti secara aktif oleh perwakilan asosiasi industri: HKI, GAPENSI, PERKINDO, AKI, HJKI, PERKONINDO, ASPEKNAS, HIMPERRA, ISI, dan APERSI. Topik bahasan utama adalah transformasi ekonomi dalam sektor ini, dengan fokus pada isu-isu krusial seperti keamanan air, kontribusi sektor konstruksi terhadap ekonomi, penerapan hunian berimbang, serta tantangan regulasi dan legalitas perizinan.

Para peserta FGD juga mengidentifikasi beberapa tantangan mendasar, termasuk backlog perumahan, ketidakstabilan harga bahan baku, kualitas sumber daya manusia (SDM), dan tumpang tindih kebijakan kawasan industri. Diskusi ini juga menggarisbawahi kebutuhan penyesuaian kebijakan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan memfasilitasi pertumbuhan yang berkelanjutan.

(lanjutan di halaman 5)



Identifikasi tantangan dan rekomendasi prioritas dari diskusi ini akan menjadi bagian dari pembangunan sektor konstruksi, infrastruktur, dan properti dalam white paper.



FGD Strategi Pembangunan Sektor Minyak dan Gas Bumi: Menentukan Langkah Besar untuk Masa Depan Energi Indonesia



Pada tanggal 13 Agustus 2024, Kadin Indonesia juga melaksanakan FGD dengan tema Sektor Minyak dan Gas Bumi. Berlokasi di Menara Kadin Indonesia, FGD ini dipandu oleh Ketua Komtap Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pengurus dari Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Asosiasi Lembaga BUMN sektor Minyak dan Gas Bumi.

Diskusi ini berfokus pada penentuan *bold moves* atau langkah besar yang perlu diambil untuk mengatasi isu-isu prioritas dalam sektor minyak dan gas bumi. Beberapa langkah strategis hasil diskusi adalah:

- 01 → Penjaminan kepastian hukum melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas untuk meningkatkan iklim investasi;
- 02 → Peninjauan kembali kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk menyesuaikan harga dengan kondisi pasar terkini;
- 03 → Evaluasi kembali konglomerasi BUMN di sektor migas untuk memastikan efisiensi dan kompetisi;
- 04 → Penetapan regulasi yang jelas untuk teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) dan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS);
- 05 → Peningkatan koordinasi antara Kementerian dan Pemerintah Daerah guna sinkronisasi kebijakan; serta
- 06 → Perubahan parameter migas dalam APBN, khususnya dalam variabel Reserve Replacement Ratio, untuk mencerminkan kondisi nyata sektor.

(lanjutan di halaman 6)



Kegiatan FGD ini akan diikuti dengan diskusi lanjutan antara Bidang ESDM dan Bidang Perindustrian yang terkait Energy Pricing dan Energy Resilience. Diskusi ini diharapkan Sektor Minyak dan Gas Bumi dapat merumuskan strategi industri yang lebih komprehensif guna memastikan minyak dan gas bumi Indonesia tetap berdaya saing dan berkelanjutan di masa depan.

Menjaga Fondasi Ekonomi Nasional: Peran Cybersecurity dalam White Paper Kadin 2025-2029



Keamanan siber telah menjadi salah satu isu paling krusial dalam lanskap usaha dan bisnis saat ini. Seiring dengan pesatnya digitalisasi ekonomi, ancaman terhadap keamanan data dan infrastruktur digital juga semakin meningkat. Hal ini mendorong Kadin Indonesia untuk mengumpulkan masukan yang terkait kewanamanan siber bagi penyusunan White Paper Usulan Arah Pembangunan Ekonomi 2024-2029.



Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika, Firlie H. Ganinduto, memimpin Focus Group Discussion (FGD) pada 15 Agustus 2024. FGD ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan Anggota Luar Biasa (ALB) seperti APTISI, AFTECH, ABI, dan ASPILUKI.

FGD menggarisbawahi aspek penting dari keamanan siber bagi industri: kesadaran, penguatan ekosistem industri keamanan siber, peningkatan SDM dari implementasi keamanan siber oleh pelaku industri.

(lanjutan di halaman 7)



FGD bersama dan Blueprint pengembangan industri keamanan siber di Indonesia akan dimasukkan ke dalam white paper

Optimalisasi Potensi Daerah bagi Pembangunan Ekonomi Nasional 2024-2029

Focus Group Discussion (FGD) juga dilaksanakan bagi kewilayahan dengan melibatkan Kadin Provinsi dari seluruh Indonesia. Diskusi ini menjadi bagian penting dalam menyusun White Paper Usulan Arah Pembangunan Ekonomi 2024-2029, utamanya dalam rangka memastikan kontribusi setiap wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Wakil Ketua Umum Wilayah Sumatera Teuku Zulham, Wakil Ketua Umum Wilayah Jawa-Bali Juni Rahman, Wakil Ketua Umum Wilayah Kalimantan Feri Rizal, Wakil Ketua Umum Wilayah Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat Amir Hamzah, melaksanakan FGD Kewilayahan bersama Pengurus Kadin Provinsi Seluruh Indonesia di Menara Kadin Indonesia, pada 15 Agustus 2024. Fokus pembahasan adalah rekomendasi strategis terkait peran sektor unggulan dari masing-masing daerah.

Diskusi juga menyoroti potensi dari beberapa sektor kunci seperti, agrikultur, industri otomotif, logistik, komunikasi & informasi, moneter & jasa keuangan, perumahan hingga ketahanan nasional. Potensi-potensi ini diyakini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung perekonomian nasional serta memperkuat ketahanan nasional serta melahirkan keberagaman produk komoditas di Indonesia. Hasil dari diskusi ini akan menjadi bagian integral dari White Paper, bagi arah pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk 5 tahun ke depan.

(lanjutan di halaman 8)



Menghadapi Tantangan dan Peluang Sektor Pertanian untuk Perekonomian Nasional

Sektor pertanian merupakan salah satu kontributor utama pembangunan nasional, selain memegang peran vital dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia. Mempertimbangkan hal tersebut, Kadin Indonesia lewat kolaborasi antar Bidang Pertanian menggelar FGD khusus tema pertanian di Menara Kadin Indonesia, pada 16 Agustus 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian FGD yang telah berlangsung dan bertujuan untuk mengumpulkan usulan strategis bagi penyusunan white paper.



Diskusi ini dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Pertanian, Ketua Komite Tetap Asosiasi Klaster 1, serta delapan Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin dari sektor pertanian, perkebunan dan peternakan seperti AGRI, Askindo, Dewan Teh Indonesia, Dewan Kakao Indonesia, Apkasindo, Gapki, GKS, Paskomnas. FGD ini menghasilkan identifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi sektor pertanian, serta menetapkan rekomendasi strategi untuk memperkuat daya saing dan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional 5 tahun ke depan.

FGD ini akan dilanjutkan dengan diskusi gabungan antara sektor pertanian dan sektor kelautan-perikanan, terutama dalam rangka membicarakan topik ketahanan pangan.



Penguatan Sektor Perdagangan Nasional untuk Masa Depan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. FGD sektor perdagangan dilaksanakan di Menara Kadin Indonesia, pada 22 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan, Juan Permata Adoe, hadir dan memimpin jalannya forum diskusi ini.



Dihadiri oleh pengurus Bidang Perdagangan serta asosiasi terkait, FGD secara khusus membahas topik penguatan perjanjian perdagangan, penyempurnaan kebijakan fiskal dan regulasi pendukung, serta penetapan angka dan target ekspor bagi setiap industri. Penguatan perjanjian perdagangan dan penyempurnaan kebijakan fiskal merupakan beberapa rekomendasi penting yang dipercayai dapat meningkatkan efisiensi dalam berbisnis, serta mendorong pertumbuhan ekspor dan meningkatkan iklim investasi.

Menavigasi Tantangan Pendidikan dan Kebudayaan bagi Pembangunan Ekonomi yang Lebih Kuat 5 Tahun Ke Depan



Dengan populasi yang terus berkembang dan tantangan global yang semakin kompleks, sistem pendidikan yang berkualitas dan kebudayaan yang kuat menjadi kunci bagi penciptaan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing tinggi. Sistem pendidikan yang suportif terhadap penyelesaian tantangan SDM seperti supply dari skilled labor di sektor industri strategis, menjadi salah satu topik pembahasan dalam FGD.



Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Heru Dewanto, memimpin berlangsungnya FGD di Menara Kadin Indonesia pada 20 Agustus 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai ahli dan pemangku kepentingan dari sektor pendidikan dan kebudayaan, termasuk, perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ikatan Guru Indonesia (IGI), GIZ, Ruang Guru, LAMEMBA, USAID, serta mitra lainnya.

Para anggota juga mengidentifikasi tantangan serta peluang dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, yang memiliki tujuan akhir mendukung pembangunan ekonomi nasional melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

FGD ini menghasilkan identifikasi tantangan sekaligus beberapa bold moves rekomendasi strategis yang kritikal bagi penguatan SDM Indonesia, key enabler yang dapat mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi 8%.

Membangun Layanan Kesehatan Nasional yang Lebih Kuat: Optimalisasi Industri Alat Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional, Kadin Indonesia melalui Bidang Kesehatan melaksanakan sesi FGD di Menara Kadin Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2024. Diskusi ini dipimpin oleh Ketua Komite Tetap Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), serta bertujuan untuk memberikan respon atas dinamika dan tantangan global di sektor alat kesehatan dan farmasi di Indonesia.



Sesi FGD ini juga dihadiri oleh berbagai asosiasi sektor kesehatan seperti APACMED, GAKESLAB Indonesia, HIPELKI, dan PEKERTI, serta mitra strategis dari lembaga seperti INDEF, Dayalima, McKinsey, dan BCG. Fokus pembahasan adalah mengeksplorasi potensi kontribusi sektor alat kesehatan dan farmasi dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional, tantangan utama serta rekomendasi prioritas dalam rangka mengoptimalkan potensi. FGD juga menitikberatkan pada upaya penguatan produksi alat kesehatan di Indonesia.



Rekomendasi yang dihasilkan dari diskusi ini akan dijadikan referensi dalam penyusunan white paper.

Harmonisasi Awal Dalam Rangka Menyusun Masukan Industri atas Harga Energi Bagi Perkembangan Industri di Indonesia

Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan kekayaan energinya guna mendukung hilirisasi industri. Lebih jauh, harga energi yang stabil dan proses hilirisasi yang efektif merupakan dua elemen penting dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Guna mendalami dua topik di atas, Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Solihin J. Kalla, memimpin kegiatan FGD yang terkait harga energi dan hilirisasi. Bertempat di Menara Kadin Indonesia, sesi FGD yang diselenggarakan pada 22 Agustus 2024 ini menghadirkan Ketua Umum Kadin Provinsi Kalimantan Barat Arya Rizqi Darsono, Ketua Komite Tetap Minyak dan Gas Bumi, serta Ketua Komite Tetap Ketenagalistrikan. Selain itu, perwakilan dari sektor industri hulu dan hilir, serta Wakil Ketua Umum Bidang Asosiasi dan Himpunan, Wisnu W. Pettalolo, juga aktif berpartisipasi dalam FGD ini.



Di FGD harmonisasi awal soal harga energi ini, selain mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha terkait fluktuasi harga energi, partisipan juga memberikan pandangan dan rekomendasi terkait kebijakan pengaturan harga energi yang tidak hanya menguntungkan industri, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, strategi percepatan hilirisasi juga menjadi topik utama, dengan fokus pada bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor terkait.

Hasil diskusi ini akan menjadi masukan bagi white paper, khususnya terkait kebijakan yang komprehensif dan aplikatif dalam memperkuat sektor energi dan hilirisasi di Indonesia.



Merumuskan Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan untuk Masa Depan

Ketahanan pangan merupakan isu sentral dalam pembangunan ekonomi karena menyangkut kesejahteraan masyarakat dan stabilitas nasional. Dalam konteks global yang dinamis, termasuk perubahan iklim, krisis geopolitik, dan fluktuasi pasar, memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas menjadi tantangan utama.

Wakil Ketua Umum Bidang Asosiasi dan Himpunan, Wisnu W. Pettalolo, bekerjasama dengan Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan dan Perikanan, Joseph Pangalila, memimpin Focus Group Discussion (FGD) terkait isu ketahanan pangan sebagai bagian dari FGD untuk menyusun White Paper Arah Pembangunan Bidang Ekonomi tahun 2024-2029 di Menara Kadin Indonesia, pada 29 Agustus 2024. Diskusi ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan, Juan Permata Adoe, serta Ketua Komite Tetap Asosiasi Sektor Pertanian dan Perkebunan.

Para pengurus membahas berbagai isu kritis yang menjadi hambatan dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, termasuk kebutuhan peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan, kekurangan dalam neraca pangan, serta tantangan food loss and waste yang masih signifikan. Selain itu, dibahas pula kurang optimalnya keanekaragaman asupan pangan dan perlunya revisi regulasi untuk mendukung sektor ini.

FGD menyepakati bahwa peningkatan produktivitas dan efisiensi di sektor pertanian dan perikanan merupakan kunci bagi ketahanan pangan yang tangguh. Perbaikan rantai distribusi pangan serta diversifikasi asupan pangan masyarakat diharapkan dapat memastikan keseimbangan nutrisi dan kesehatan turut menjadi topik kunci dalam diskusi ini. Hasil dari FGD juga akan menjadi bagian dari rekomendasi strategis industri.



Transformasi Sektor Ketenagakerjaan dalam Pembangunan Ekonomi 2024-2029

Transformasi dalam sektor ketenagakerjaan tidak hanya penting untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, tetapi juga untuk memastikan bahwa angkatan kerja Indonesia dapat bersaing di pasar global dan beradaptasi dengan kebutuhan industri yang berkembang. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan memerlukan penanganan masalah ketenagakerjaan secara efektif.



Wakil Ketua Umum Bidang Vokasi dan Sertifikasi, Adi Mahfudz, memimpin FGD yang dilaksanakan di Menara Kadin Indonesia pada 26 Agustus 2024 lalu. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Komite Tetap termasuk Hubungan Industrial, Pengupahan, dan Jaminan Sosial, Ketua Komite Tetap Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Tenaga Kerja, Ketua Komite Tetap Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Ketua Komite Tetap Pembinaan dan Pengawasan Norma Kerja dan K3, Ketua Komite Tetap Perencanaan Tenaga Kerja, Data dan Informasi, dan Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja.

Diskusi ini juga melibatkan perwakilan dari asosiasi dan/atau institusi terkait seperti GREAT NUSA by Binus, HIMSATAKI, HR Expertise, ABADI, Economist, IGCN, DPLTK, HIPKI, dan Prudential Syariah. Para anggota FGD membahas beberapa topik penting termasuk: kesenjangan keterampilan, vokasi, produktivitas tenaga kerja, dan terbatasnya lowongan pekerjaan di Indonesia. Upaya untuk menyelaraskan kebutuhan industri dengan pelaksanaan pelatihan dan pendidikan menjadi kunci penting dalam mengatasi masalah-masalah ketenagakerjaan di Indonesia.

Mendorong Investasi Asing: Peran FDI dalam Pembangunan Ekonomi Nasional

Foreign Direct Investment (FDI), berperan penting dalam menyediakan modal dan teknologi yang diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Dengan meningkatnya persaingan global, strategi untuk menarik dan mempertahankan investasi menjadi semakin penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ketua Komite Tetap Bidang Investasi, Reza Maspaitella, memimpin berlangsungnya FGD sektor investasi di Menara Kadin Indonesia pada 28 Agustus 2024. Mengusung tema "The Role of Investment in Promoting National Economic Growth", FGD ini dihadiri oleh delapan international chambers, seperti Indonesia Canada Chamber of Commerce, American Chamber of Commerce in Indonesia, Confederation of Indian Industry, Jakarta Japan Club, Thai Chamber of Commerce Indonesia, dan Philippines Indonesia Business Club Indonesia.

(lanjutan di halaman 14)





Hadir pula perwakilan dari Indonesia Mining Association, sektor yang tercatat sebagai salah satu penerima FD terbesar pada tahun 2023. Selama diskusi berlangsung, para pengurus membahas strategi untuk meningkatkan FDI ke Indonesia, diantaranya melalui kebijakan yang mendukung dan reformasi regulasi. Tantangan yang dihadapi oleh investor juga menjadi topik utama, termasuk hambatan birokrasi, ketidakpastian hukum, dan masalah infrastruktur yang dapat mempengaruhi keputusan investasi.

Memperkuat Ketahanan Air Nasional bagi Pembangunan Ekonomi

Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan pertumbuhan populasi, ketahanan air atau *water resiliency* menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian khusus. Ketahanan air melibatkan kemampuan suatu negara dalam mengelola sumber daya air secara berkelanjutan, memastikan ketersediaan air yang memadai untuk kebutuhan domestik, pertanian, dan industri, sambil meminimalkan risiko bencana terkait air, seperti banjir dan kekeringan. Dalam konteks Indonesia, pengelolaan air yang terintegrasi dan inklusif menjadi salah satu kunci bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Guna membahas topik penanganan ketahanan air, Wakil Ketua Umum Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Infrastruktur, Insannul Kamil, menghadiri diskusi daring bersama sejumlah perwakilan dari beberapa bidang terkait, termasuk PUPR & Infrastruktur, Lingkungan Hidup & Kehutanan, Kelautan & Perikanan, ESDM, serta Badan Logistik & Rantai Pasok. Fokus utama dari diskusi ini adalah identifikasi tantangan yang dihadapi dalam memastikan ketahanan air di Indonesia, yang mencakup seluruh ekosistem dari hulu hingga hilir.

Berbagai isu lain juga dibahas dalam diskusi ini, termasuk perubahan penggunaan lahan yang memengaruhi sumber daya air, distribusi dan pemanfaatan air yang belum merata, serta kebutuhan akan insentif dan tata kelola yang lebih baik antara berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, kolaborasi antara sektor publik dan swasta dinilai sangat penting untuk menciptakan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.

(lanjutan di halaman 15)





Merumuskan Kebijakan Ekonomi Berbasis Pengembangan Riset dan Teknologi

Kadin Indonesia melalui Badan Riset dan Teknologi (BRITEK) menggelar FGD pada tanggal 28 Agustus 2024, untuk merumuskan arah pembangunan dan kebijakan ekonomi nasional untuk periode 2024-2029. Penekanan FGD adalah pada pengembangan riset dan teknologi untuk meraih target pembangunan ekonomi. Diskusi yang berlangsung secara hybrid ini dipimpin oleh Wakil Kepala Badan Bidang Pendanaan & Insentif Pajak serta Sekretaris BRITEK dan dihadiri oleh pengurus dari berbagai bidang terkait, seperti Energi dan Sumber Daya Mineral, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, serta perwakilan ALB dari sektor energi, kesehatan, logistik, komunikasi, tekstil, dan lingkungan.



FGD ini menyoroti pentingnya pemetaan isu-isu strategis yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur teknologi, yang merupakan fondasi utama bagi kemajuan sektor industri di Indonesia. Para pengurus sepakat bahwa pengembangan SDM yang unggul dan adaptif terhadap teknologi adalah kunci untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Mereka menekankan bahwa Indonesia harus segera mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi canggih seperti Artificial Intelligence (AI) dan Internet of Things (IoT) ke dalam berbagai sektor industri. Teknologi ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga membuka peluang baru dalam inovasi produk dan jasa.

Penguatan infrastruktur teknologi dan peningkatan kapasitas SDM juga dianggap sebagai langkah berani (*bold moves*) yang harus segera dilakukan agar Indonesia tidak tertinggal dalam perkembangan industri global. Peserta diskusi menggarisbawahi bahwa pengembangan infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet yang luas dan stabil, pusat data yang andal, serta sistem keamanan siber yang kuat, harus menjadi bagian dari strategi nasional.



Merancang Kebijakan Transportasi dan Logistik 2024-2029

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perhubungan dan Badan Logistik & Rantai Pasok telah digelar di Menara Kadin Indonesia, pada 26 Agustus 2024. Rakornas ini dibuka oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek & Inovasi, Carmelita Hartoto. Rakornas selanjutnya juga dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan, Denon Prawiraatmadja, dan Kepala Badan Logistik & Rantai Pasok, Akbar Djohan, serta dihadiri oleh perwakilan dari Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa (ALB) yang memiliki peran penting di sektor transportasi dan logistik, dimana hal ini menunjukkan komitmen bersama untuk mengatasi tantangan di bidang ini.



Salah satu topik utama yang menjadi pembahasan dalam Rakornas ini adalah peningkatan kualitas infrastruktur perhubungan, termasuk jalan raya, pelabuhan, dan bandara. Para pengurus dan peserta rapat menekankan pentingnya infrastruktur yang efisien dan modern guna mendukung pergerakan logistik yang cepat dan andal. Selain itu, perhatian khusus juga perlu diberikan pada pergerakan logistik melalui jalur laut dan udara, yang memerlukan perbaikan sistem untuk memastikan kelancaran distribusi barang di seluruh nusantara.



Ketersediaan BBM bersubsidi juga menjadi salah satu agenda pembahasan utama, mengingat pentingnya bahan bakar yang terjangkau bagi operasional logistik yang optimal. Dalam konteks regulasi, peserta Rakornas menekankan pentingnya dilakukan penyesuaian terhadap payung hukum yang mendukung Sistem Logistik Nasional dan National Logistic Ecosystem (NLE), sehingga mampu menciptakan ekosistem logistik yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan industri.

(lanjutan di halaman 17)

FGD Proyek Usulan Arah Pembangunan Bidang Ekonomi: Bahas Tantangan dan Arah Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk regulasi bagi nelayan dan pengusaha, serta tantangan dan belum dilakukannya sinkronisasi data. Sebagai akibat dari tantangan-tantangan utama ini, maka optimalisasi dari sektor kelautan dan perikanan Indonesia dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia menjadi terhambat.



Tantangan tersebut menjadi landasan dasar bagi Kadin Indonesia dalam menginisiasi Focus Group Discussion (FGD) untuk sektor kelautan dan perikanan yang dilaksanakan pada 7 Agustus 2024. Kegiatan FGD ini sekaligus menjadi bagian dari langkah persiapan penyusunan White Paper Arah Pembangunan Bidang Ekonomi Tahun 2024-2029 dan bertujuan untuk menghimpun berbagai aspirasi dari dunia usaha sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.



FGD ini dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan dan Perikanan, Joseph Pangalila, bersama para Ketua Komite Tetap Bidang Kelautan dan Perikanan, serta perwakilan dari Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI), Shrimp Club Indonesia (SCI), dan Asosiasi Pengelola Rajungan Indonesia (APRI). Joseph Pangalila menekankan bahwa sektor perikanan perlu mendapat perhatian yang sama besar dengan sektor pertanian dalam framework ketahanan pangan.

Hasil diskusi ini akan disinkronisasikan dengan sektor pertanian sehingga membentuk masukan yang lebih utuh terkait isu ketahanan pangan. Hasil dari FGD yang salah satunya fokus pada penetapan target prediksi untuk tiap sektor bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi pada bidang kelautan dan perikanan.



Arah Pembangunan Sektor Pertambangan Dalam Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Sektor pertambangan di Indonesia memainkan peran penting dalam perekonomian nasional, menyumbang sekitar 10,52% dari PDB dan memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui pajak dan royalti. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada tahun 2023, sektor ini menghasilkan lebih dari USD 59,49 miliar dengan ekspor mineral dan batubara sebagai komoditas yang paling banyak diekspor oleh Indonesia, menjadikan Indonesia salah satu pemain utama di pasar global. Namun, isu-isu seperti ketahanan energi nasional, praktik penambangan, dan pengembangan komoditas green products telah menjadi tantangan utama bagi pelaku usaha.

Dalam rangka membahas strategi pertumbuhan ekonomi melalui sektor pertambangan, Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Solihin J. Kalla, mengadakan Focus Group Discussion (FGD) di Menara Kadin Indonesia pada 8 Agustus 2024. Diskusi ini dihadiri oleh jajaran pengurus Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta sejumlah Anggota Luar Biasa (ALB) sektor pertambangan, seperti APBI, ICMA, ATBI, APNI, PERTAMISI, APLSI, METI, dan lain-lain.

Hilirisasi industri juga menjadi salah satu pokok bahasan penting dalam FGD ini. Diharapkan FGD ini dapat mendukung perumusan rekomendasi kebijakan untuk pemerintahan baru, khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.





FGD/SEMINAR

Kadin Indonesia Tampung Aspirasi ALB Terhadap RUU Komoditas Strategis Perkebunan



RUU Komoditas Strategis Perkebunan disusun dengan tujuan untuk menciptakan kerangka regulasi yang lebih efektif bagi pengelolaan komoditas strategis, mendukung daya saing, dan memastikan keberlanjutan sektor perkebunan. Dalam konteks ini, penting bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembahasan dan penyelarasan regulasi, termasuk para pengusaha di sektor pertanian dan perkebunan, untuk melakukan komunikasi dan kolaborasi.



Wakil Ketua Umum Bidang Asosiasi dan Himpunan, Wisnu W. Pettalolo, dan Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan, Juan Permata Adoe, bersama jajaran pengurus Bidang Pertanian serta Anggota Luar Biasa (ALB) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) guna membahas lebih RUU ini secara lebih mendalam yang berlangsung pada 1 Agustus 2024. FGD ini dihadiri oleh 11 perwakilan ALB, termasuk Asosiasi The Indonesia, APBI/ Dewan Karet Indonesia, Dewan Rempah Indonesia, GAPKINDO, ASKINDO, HIPKI, AIKI, DMSI, GIMNI, Dewan Teh Indonesia, GAPKI.

Berbagai aspirasi dan rekomendasi dari Anggota Luar Biasa (ALB) yang fokus pada tujuh komoditas strategis utama, yaitu: kelapa sawit, karet, kopi, kakao, tebu, teh dan tembakau ditampung dalam FGD ini. FGD ini juga menyepakati pentingnya penyelarasan narasi komoditas strategis dari sektor pertanian dan perkebunan. Selain itu, sinergi ekosistem dari hulu hingga hilir juga dinilai krusial untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini.

Perwakilan ALB di sektor perkebunan berharap bermaksud dapat diadakan pertemuan rutin, guna memantau perkembangan dan evaluasi implementasi RUU, sehingga Kadin Indonesia dapat memberikan masukan yang relevan.

Mewujudkan Perdagangan Inklusif: Peran UMKM Perempuan dalam Kemitraan Indonesia - Chili



Hubungan bilateral antara Indonesia dan Chili telah berkembang pesat sebagaimana ditandai oleh komitmen kedua negara untuk memperkuat kerjasama dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan dan investasi. Sebagai upaya mendorong kebijakan mendukung pengembangan UMKM dan perdagangan inklusif, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi dan Luar Negeri, Shinta W. Kamdani, menghadiri dan memberikan kata sambutan dalam kegiatan “Round-Table on Trade and Gender Policies: Chilean and Indonesian Initiatives to Promote Gender and Trade Mainstreaming”. Wakil Ketua Umum Perdagangan, Juan Permata Adoe dan Wakil Ketua Umum Hubungan Internasional, Bernardino M. Vega juga turut hadir dan menjadi narasumber dalam kegiatan ini.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Chili di Indonesia bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada 15 Agustus 2024 di Jakarta. Agenda kegiatan termasuk rangkaian kata sambutan dari Duta Besar Chili untuk Indonesia, H. E Mario Ignacio Artaza, dan Direktur Utama BRI, Sunarso.

Topik pembahasan sesi termasuk kebijakan perdagangan dan pengembangan UMKM dengan penekanan khusus pada perdagangan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan. Peran penting UMKM yang dipimpin perempuan serta keterlibatannya dalam merumuskan kebijakan perdagangan juga menjadi topik utama yang dibahas. Peningkatan keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi formal, diharapkan dapat memperkuat otonomi ekonomi perempuan sekaligus memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, termasuk lewat peningkatan pendapatan dan akses lebih baik ke sumber daya serta teknologi.

Kegiatan Round-Table antara pebisnis pebisnis Indonesia dan Chili ini mencerminkan upaya bersama untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan mendukung pertumbuhan UMKM di tingkat internasional. Kadin Indonesia juga berkomitmen untuk mengatasi kesenjangan gender dalam ekonomi dan mendukung pemberdayaan perempuan sebagai motor penggerak ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.



FGD/SEMINAR

FGD Bersama Tech for Good Institute: Peran Platform Digital dalam Pembangunan Berkelanjutan



Kadin Indonesia melalui Bidang Komunikasi dan Informatika berkolaborasi dengan Tech for Good Institute (TFGI) dalam penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Digital Platforms and Impactful Innovations: Towards Sustainable Development in Indonesia”. Lebih dari 70 peserta yang berasal dari berbagai kalangan, termasuk perwakilan kementerian, akademisi, profesional, UMKM, dan komunitas bisnis menghadiri kegiatan yang diadakan di The Langham Jakarta, pada 22 Agustus 2024 ini.



FGD ini dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika, Firlie H. Ganinduto dan dihadiri oleh Ketua Komite Tetap Aplikasi Teknologi Komunikasi & Informatika serta beberapa Wakil Ketua Komite Tetap terkait. Diskusi ini menggarisbawahi peran krusial platform digital dalam transformasi ekonomi digital di Asia Tenggara, sekaligus kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Para panelis yang hadir memberikan wawasan tentang bagaimana platform digital dapat mempengaruhi berbagai sektor, meningkatkan efisiensi, dan mendorong inovasi yang berdampak positif pada masyarakat. Forum ini juga membahas tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengintegrasikan teknologi digital dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, serta bagaimana kebijakan dan strategi yang tepat dapat mendukung kemajuan ini.

PROGRAM PENGURUS

Turut Mendorong Inovasi *Artificial Intelligence*, Kadin Indonesia Berpartisipasi di Artificial Intelligence Innovation Summit 2024

Kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), telah menjadi kekuatan pendorong transformasi di berbagai sektor industri. AI, dengan kemampuannya untuk menganalisis data besar, mengotomatisasi proses, dan menyediakan wawasan berbasis *machine learning*, telah memegang peranan kunci dalam merubah lanskap ekonomi dan sosial global.

Mencermati perkembangan ini, Kadin Indonesia, sebagai representasi dunia usaha, berperan aktif dalam mendorong pemanfaatan dan pengembangan teknologi ini di tanah air. Hal ini diwujudkan melalui keterlibatan Kadin Indonesia yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika, Firlie H. Ganinduto, sebagai narasumber utama di *Artificial Intelligence Innovation Summit* yang diadakan pada 13 Agustus 2024 di JIExpo, Jakarta.



Dalam paparannya, Firlie H. Ganinduto menjelaskan pentingnya alokasi dana investasi baik dari pemerintah maupun sektor swasta untuk pembangunan infrastruktur AI. Hal ini mencakup aspek fisik seperti data center dan cloud computing, serta dukungan non-fisik yang meliputi riset dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

AI Innovation Summit 2024 diselenggarakan oleh Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (KORIKA), dan dihadiri berbagai pemangku kebijakan, profesional, peneliti, pelaku industri, dan akademisi dari berbagai latar belakang. Melalui dialog dan kolaborasi, kegiatan ini bertujuan untuk menampilkan perkembangan terbaru dan tren dalam AI serta aplikasinya yang inovatif. Kegiatan ini juga berfokus pada penguatan dampak positif yang luas di bidang sosial dan ekonomi serta mengatasi tantangan global yang ada.

Rakornas Bidang Pemberdayaan Perempuan Kadin Indonesia 2024

Stunting, yang dikenal sebagai kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terus menjadi tantangan signifikan di Indonesia. Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia mencapai 21,6% di 2022. Adapun target tahunannya yaitu menurunkan angka stunting sebesar 3,8 persen, atau jika dikonversi ke prevalensi stunting 2023 sampai akhir tahun diharapkan turun menjadi 17,8 persen. Saat ini kita masih cukup jauh dari target pemerintah yang menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi di bawah 14% (2024).

Pencegahan stunting memerlukan perhatian dari semua pihak, khususnya kaum perempuan yang memainkan peran kunci dalam pengelolaan gizi dan kesehatan keluarga. Sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung upaya pengentasan stunting dan mitigasi bencana, Kadin Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Menara Kadin Indonesia pada 15 Agustus 2024. Rakornas yang mengangkat tema “Generasi Perempuan Emas 2045 dalam Mitigasi Bencana dan Pencegahan Stunting” ini merupakan kolaborasi dari tiga bidang di bawah Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek Dan Inovasi.



Turut hadir dalam kegiatan ini adalah Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek, dan Inovasi Carmelita Hartoto, Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan, Tri Hanurita S., bersama Wakil Ketua Umum Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana, Yani Motik, dan Wakil Ketua Umum Bidang Kesehatan, Charles Honoris. Acara ini memiliki misi untuk memperkuat pemberdayaan perempuan dalam menghadapi tantangan stunting dan bencana, yang merupakan dua isu krusial bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.



Rakornas ini juga melibatkan narasumber dari Kementerian dan Lembaga terkait, termasuk Deputy Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Asisten Deputy Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dari Kementerian Kesehatan. Sejumlah 45 peserta lainnya dari Kadin Daerah dan pengusaha perempuan anggota Kadin juga turut hadir dalam diskusi ini sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pengentasan stunting dan mitigasi bencana.



PROGRAM PENGURUS

Talkshow Business Judgement Rule: Menyoroti Pentingnya Revisi UU BUMN untuk Penguatan Tata Kelola Perusahaan



Kepastian hukum merupakan faktor sangat penting dalam meningkatkan iklim investasi usaha. Pada tanggal 21 Agustus 2024, Pengurus Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengadakan talkshow bertajuk "Analisis Hukum Penerapan Business Judgment Rules dalam Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Direksi BUMN & Dampaknya Terhadap Kepastian Berusaha di Indonesia" di Bimasena, Dharmawangsa. Acara ini menyoroti isu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan praktik business judgment rules, serta urgensi revisi Undang-Undang BUMN dalam memperkuat mekanisme pertanggungjawaban dan transparansi di lingkungan BUMN.



Narasumber dari kegiatan ini adalah Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Dhaniswara K. Hardjono, Pengacara Hotman Paris & Partners, Frank Hutapea dan dimoderatori oleh Wakil Ketua Komite Tetap Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dan Blockchain, Erdina Oudang. Diskusi yang turut dihadiri oleh para pakar hukum, perwakilan pemerintah dan praktisi industri ini mengungkapkan bahwa struktur hukum yang ada saat ini masih belum optimal dalam mencegah tindakan korupsi di BUMN. Revisi UU BUMN dianggap perlu untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat guna meningkatkan akuntabilitas para direktur dan pejabat BUMN.



Dhaniswara menilai, baik elemen maupun stakeholder hukum, belum satu pemikiran terkait interpretasi perbuatan melawan hukum atau kerugian negara, sehingga perlu dilakukan harmonisasi. Ia juga menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kadin Indonesia untuk berperan aktif dalam memperkuat tata kelola perusahaan negara.

PROGRAM PENGURUS

Transformasi Jasa Keuangan melalui AI: Laporan Terbaru Hasil Kolaborasi Kadin Indonesia, AC Ventures dan BCG-X



Kadin Indonesia berkolaborasi dengan AC Ventures dan BCG-X, divisi teknologi dan desain Boston Consulting Group, meluncurkan laporan terbaru yang bertajuk *"Harnessing the Power of (Gen) AI in Indonesian Financial Services"*. Sesi konferensi pers yang membuka peluncuran laporan ini dihadiri oleh Kepala Badan Ekonomi dan Financial Technology (BENEFIT) Kadin Indonesia, Pandu Sjahrir, yang juga berperan sebagai panelis dalam sesi diskusi panel, di Jakarta pada 14 Agustus 2024.

Melalui paparannya, Pandu menjelaskan bahwa laporan ini mengeksplorasi penerapan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, serta membahas tantangan dan risiko yang dihadapi dalam implementasi AI generatif. Laporan ini menyajikan gambaran mendalam tentang lanskap AI di sektor jasa keuangan, mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh industri, dan menguraikan potensi risiko yang mungkin timbul dari penerapan teknologi ini.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi penting dalam pembuatan white paper Kadin yang berfokus pada langkah-langkah strategis untuk mendorong adopsi AI di Indonesia.



Bapak/Ibu dapat mempelajari lebih lanjut mengenai laporan tersebut dengan memindai QR code berikut



PROGRAM PENGURUS

Partisipasi Kadin Indonesia dalam Workshop US-ABC dan USTDA: Mewujudkan Cyber-Secure Digital Domain yang Aman



Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, keamanan siber (cyber security) menjadi perhatian utama dalam melindungi data dan sistem informasi dari ancaman yang semakin canggih. Untuk mengatasi tantangan ini, Kadin Indonesia berpartisipasi dalam workshop yang diselenggarakan oleh US-ABC (U.S. - ASEAN Business Council) dan U.S. Trade & Development Agency (USTDA). Workshop ini mengkaji tentang pengembangan domain digital yang aman melalui kolaborasi industri.



Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika, Firlie H. Ganinduto, menjadi panelis dalam lokakarya *"Joint Workshop US-ABC with U.S. Trade & Development Agency: Advancing a Cyber-Secure Digital Domain Through Industry Co-creation"*, yang diadakan di Park Hyatt Jakarta, pada 29 Agustus 2024. Firlie memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memaparkan kemajuan dari *"National Cybersecurity Blueprint Industry Development"* yang merupakan hasil kolaborasi antara Kadin Indonesia dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Blueprint ini dirancang untuk memperkuat keamanan siber nasional melalui pendekatan yang terintegrasi dan strategis.

Firlie juga menyampaikan apresiasi kepada US-ABC dan Palo Alto Network, atas kontribusinya dalam penyusunan white paper Cybersecurity Kadin Indonesia. Dokumen ini memainkan peran krusial dalam persiapan implementasi Blueprint Cybersecurity dan diharapkan dapat menyediakan panduan yang efektif untuk meningkatkan strategi keamanan siber di Indonesia.

PROGRAM PENGURUS

Lokakarya Pengembangan Sistem Manajemen Keberlangsungan Usaha: Meningkatkan Kesiapan UMKM Menghadapi Bencana



Kesiapan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menghadapi bencana adalah faktor penting untuk memastikan kelangsungan operasional bisnis dan stabilitas ekonomi lokal. Bencana alam atau krisis dapat mengganggu aktivitas usaha, menyebabkan kerusakan infrastruktur, dan berdampak besar pada pendapatan serta kelangsungan usaha UMKM. Oleh karena itu, memiliki sistem manajemen yang baik untuk menghadapi bencana sangat diperlukan agar UMKM dapat bertahan dan pulih dengan cepat dari situasi darurat.

Sebagai upaya menanggulangi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana, Yani Motik, menggelar Lokakarya Pengembangan Panduan Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keberlangsungan Usaha yang diadakan di Hotel Neo+ Savana Bogor, pada 27 Agustus 2024. Fokus audiens dari lokakarya ini adalah UMKM yang terdampak bencana di wilayah DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, dan Provinsi Banten. Kegiatan ini diadakan berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai mitra strategis, termasuk InCRA, USAID, BNPB, dan BRI, yang juga berperan sebagai narasumber.



Tujuan utama dari lokakarya ini adalah membekali UMKM dengan sistem manajemen keberlangsungan usaha yang komprehensif. Peserta diberikan pemahaman terkait identifikasi risiko dan potensi ancaman yang mungkin mereka hadapi, serta analisis dampak bisnis yang membantu mereka memahami bagaimana bencana dapat mempengaruhi operasional mereka. Selain itu, lokakarya ini juga membahas pentingnya asuransi mikro, yang dirancang khusus untuk UMKM yang berisiko tinggi, guna menyediakan perlindungan finansial dalam menghadapi situasi darurat.

Melalui panduan ini, UMKM diharapkan dapat mengadopsi langkah-langkah preventif yang proaktif, seperti menyusun rencana kontinjensi dan memperkuat infrastruktur, sehingga mereka lebih siap dalam menghadapi dampak bencana.

PROGRAM PENGURUS

Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Lokal melalui Proyek Properti

Pada 6 Agustus 2024, Kepala Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu (BPKPT), Budiarsa Sastrawinata, memimpin rapat yang membahas progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Kuartal-II 2024, serta rencana yang akan dilaksanakan pada Kuartal-III 2024.



Salah satu bahasan dalam rapat ini adalah persiapan serah terima proyek area komersial Talise di Palu. Proyek ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat. Rapat juga membahas kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempermudah akses masyarakat terhadap perumahan layak.

Kerjasama antara Kadin Indonesia dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut menjadi topik pembahasan dalam rapat ini. Kerjasama ini bertujuan untuk menyediakan hunian layak serta perumahan kota yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta. Program ini mencakup pembangunan perumahan terjangkau dan revitalisasi kawasan kumuh menjadi area yang lebih layak huni dan produktif. Kedepannya, BPKPT akan melakukan monitoring dan evaluasi lanjutan untuk memastikan bahwa pelaksanaan proyek dan kerjasama berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.



KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

Kadin Indonesia dan PEKERTI Bahas Regulasi Distribusi Alat Kesehatan

Komite Tetap Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kadin Indonesia, mengadakan pertemuan dengan PEKERTI (Perkumpulan Perusahaan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Indonesia) di Menara Kadin Indonesia pada 8 Agustus 2024. Agenda pertemuan ini membahas regulasi terkait distribusi alat kesehatan dan berfokus pada ketentuan IDAK (Izin Distribusi Alat Kesehatan) dan CDAKB (Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik).



Dalam pertemuan tersebut, PEKERTI menyampaikan rekomendasi untuk mengklasifikasikan alat kesehatan berdasarkan tingkat risiko, yaitu risiko tinggi dan risiko rendah. Rekomendasi ini bertujuan untuk memperbaiki pengawasan dan distribusi alat kesehatan di Indonesia. Komite Tetap Alat Kesehatan dan PKRT mengimbau agar PEKERTI mengadopsi standar dari negara-negara seperti Filipina, Singapura, dan Malaysia yang dinilai sesuai dengan konteks Indonesia. Selain itu, diusulkan agar dilakukan riset produk secara mendalam untuk menentukan klasifikasi risiko alat kesehatan dengan lebih akurat.

KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

Evaluasi Capaian Bidang Vokasi dan Sertifikasi dalam Rapat Koordinasi Bersama Kemenko PMK RI



Wakil Ketua Umum Bidang Vokasi dan Sertifikasi, Adi Mahfudz, menghadiri Rapat Koordinasi Laporan Capaian Semester I Tahun 2024 dan Finalisasi Instrumen Monitoring dan Evaluasi, yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Jakarta, pada 6 Agustus 2024. Dalam acara ini turut hadir pula Ketua Komtap Pendidikan Vokasi, Ketua Komtap Pelatihan Vokasi, Ketua Komtap Kerja Sama K/L & Industri, Ketua Komtap Sertifikasi Profesi, Kemenaker, BNSP, serta perwakilan dari beberapa universitas terkemuka.

Mewakili dunia usaha, Kadin Indonesia berperan strategis dalam hal ini guna memastikan bahwa kebijakan pendidikan dan pelatihan vokasi yang dirumuskan dapat selaras dengan kebutuhan industri.

Selama rapat koordinasi berlangsung, seluruh pihak terkait baik dari Kementerian dan Lembaga memaparkan laporan capaian kerja masing-masing selama semester 1 tahun 2024 dalam implementasi Perpres 68 tahun 2022. Dalam rapat ini juga diadakan evaluasi pencapaian target, identifikasi hambatan yang dihadapi, serta membahas upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Kemenko PMK akan menyusun laporan dari hasil diskusi pada rapat ini dan nantinya akan menjadikan laporan tersebut sebagai rekomendasi kebijakan untuk pembangunan SDM di masa mendatang. Melalui kolaborasi antara berbagai pihak terkait, diharapkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi dapat optimal.



Kadin Indonesia Dukung Pemerintah dalam Pengawasan Impor Ilegal

Dalam upaya menjaga tata niaga yang adil dan melindungi pasar domestik, Wakil Ketua Umum Bidang Himpunan dan Asosiasi Wisnu W. Pettalolo, bersama Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Juan Permata Adoe, mendampingi Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan, dalam konferensi pers mengenai pengawasan terhadap barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor. Konferensi pers yang dilaksanakan pada 19 Agustus 2024 ini, bertujuan untuk memaparkan hasil pengawasan perdagangan dan penanganan impor ilegal yang dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan bahwa hasil tangkapan barang ilegal mencapai nilai sekitar 20 miliar Rupiah. Barang-barang yang diamankan meliputi peralatan elektronik, ban, minuman beralkohol, dan produk tekstil. Tindakan tegas pemerintah ini menekankan komitmen untuk mengatasi impor ilegal yang dapat merugikan ekonomi dan industri domestik.



Senada dengan hal tersebut, Wisnu W. Pettalolo menyatakan bahwa Kemendag telah berhasil menekan angka impor ilegal di Indonesia melalui upaya pengawasan dan penindakan. "Satgas yang telah dibentuk, inovasi pemerintah, dan suara dunia usaha dalam tujuh komoditas telah menunjukkan penurunan kegiatan impor ilegal setiap bulannya," imbuhnya.



Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan pajak serta mencegah barang-barang ilegal masuk ke Indonesia. Ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan perdagangan di tanah air.

Kadin Indonesia bermaksud untuk terus mengawal upaya Satgas dan berkolaborasi untuk mendukung keberlanjutan program pengawasan ini, sekaligus memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil dapat membawa manfaat jangka panjang bagi stabilitas ekonomi nasional.

KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

Audiensi Persiapan Forum Bisnis Daerah oleh Bidang Pengembangan Otonomi Daerah

Sepanjang bulan Agustus, Bidang Pengembangan Otonomi Daerah secara intensif mengadakan audiensi dengan sejumlah Kementerian terkait persiapan Forum Bisnis Daerah yang dijadwalkan akan berlangsung bulan September 2024. Audiensi menjadi langkah penting mengingat Forum Bisnis Daerah tersebut akan menjadi platform strategis bagi sinergi pemerintah dan pengusaha di tingkat pusat dan daerah.



Audiensi Kadin dengan Kemenparekraf: Dorong Sinergi dalam Forum Bisnis Daerah

Ketua Komite Tetap Pengembangan Produk dan Komoditi Unggulan Daerah Kadin Indonesia melakukan audiensi dengan Deputi Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Parekraf di kantor Kemenparekraf, pada 26 Agustus 2024. Pokok bahasan meliputi pengenalan Forum Bisnis Daerah (Forbisda) yang akan mengambil format dialog dan *business matching*, bersama anggota Kadin dan para pengusaha.

(lanjutan di halaman 34)



Dalam audiensi juga disampaikan bahwa Forbisda akan mengangkat topik utama Trade, Tourism and Investment. Topik ini diusulkan guna memaksimalkan potensi kolaborasi di bidang perdagangan, pariwisata, dan investasi, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.

Audiensi Kadin dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Bahas Tantangan Distribusi Barang dan Database Pelaku Usaha



Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang, bersama panitia Forum Bisnis Daerah, melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri di Gedung Utama Kementerian Perdagangan, pada 27 Agustus 2024.



Dalam audiensi tersebut, Sarman menyoroti dua isu utama yang menjadi perhatian Kadin, yaitu kurangnya database pelaku usaha di tingkat daerah dan kurang optimalnya arus distribusi barang. Kedua isu ini dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memerlukan perhatian serta solusi yang konkret. Forum Bisnis Daerah, yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat, diharapkan dapat menjadi platform untuk membahas dan menemukan solusi atas permasalahan tersebut melalui dialog antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.



KEGIATAN BERSAMA DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

Kadin Indonesia dan KPPU Bahas Tindak Lanjut MoU untuk Perkuat Kepatuhan Persaingan Usaha



Persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu pilar penting dalam menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan berkelanjutan. Sebagai perwakilan dunia usaha di Indonesia, Kadin Indonesia senantiasa ingin memastikan bahwa anggotanya dapat memahami dan mematuhi regulasi persaingan usaha. Hal ini diwujudkan melalui rapat koordinasi antara Kadin Indonesia dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan, Juan Permata Adoe, bersama Wakil Ketua Umum Bidang Asosiasi dan Himpunan, Wisnu W. Pettalolo, di Gedung KPPU, pada 27 Agustus 2024. Pertemuan ini membahas tindak lanjut atas Nota Kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani antara Kadin dan KPPU pada tahun 2023, dengan tujuan memperkuat kerjasama dalam bidang persaingan usaha yang sehat.



Melalui rapat tersebut telah disepakati bahwa Kadin Indonesia dan KPPU siap untuk berkolaborasi dalam menyelaraskan model bisnis antar industri, guna menghindari penerapan kebijakan yang tidak tepat yang dapat merugikan dunia usaha. KPPU juga menyatakan komitmennya untuk lebih proaktif dalam memberikan pandangan dan bantuan kepada pelaku usaha, sementara Kadin akan berperan sebagai *knowledge partner* dalam kerangka kerja sama ini.

Pembahasan juga mencakup aspek hukum terkait UU Cipta Kerja, khususnya mengenai penghapusan sanksi pidana untuk pelanggaran persaingan usaha, kecuali dalam kasus *obstruction of justice*. Selain itu, isu sanksi denda yang dapat mencapai 50% dari pendapatan bersih atau 10% dari omzet perusahaan juga menjadi perhatian, menyoroti pentingnya program kepatuhan persaingan usaha sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Rapat ini juga menekankan kewajiban perusahaan untuk bermitra dengan UMKM sesuai dengan ketentuan dalam UU UMKM.

KUNJUNGAN INTERNASIONAL

Sinergi Kadin Indonesia dengan CII-IBF: Strategi Inovatif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia & India



Menjalin hubungan bilateral yang solid dengan negara sahabat merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kerjasama dalam berbagai sektor. Indonesia dan India telah lama menjalin hubungan erat dalam bidang budaya, ekonomi, dan politik. Pada periode 2022-2023, perdagangan bilateral antar kedua negara tercatat mencapai USD 38,84 miliar, menjadikan Indonesia sebagai mitra ekonomi utama India di kawasan ASEAN.



Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat hubungan ini, Kadin Indonesia menggelar acara bertajuk *"Open Dialogue Kadin with Indian Business Community"* di Menara Kadin Indonesia pada 6 Agustus 2024. Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, beserta Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi Dan Luar Negeri Shinta W. Kamdani, Wakil Ketua Umum Komunikasi dan Informatika Firlie H. Ganinduto, dan perwakilan dari Komite Bilateral India. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Chairman Confederation of Indian Industry - India Business Forum (CII-IBF) sekaligus CEO PT Godrej Consumer Products Indonesia, Rajesh Sethurman yang didampingi oleh perwakilan perusahaan India lainnya di Indonesia.



Dalam dialog tersebut, Kadin Indonesia mengundang anggota Confederation of Indian Industry (CII) untuk bergabung dalam Kelompok Kerja yang ada di Kadin, dengan harapan dapat menciptakan sinergi yang lebih baik antara dunia usaha Indonesia dan India. Para partisipan rapat juga membahas potensi dan tantangan di bidang keberlanjutan, kendaraan listrik, mobilitas dan transportasi. Pertemuan ini menjadi wadah kedua belah pihak untuk membahas strategi inovatif yang dapat mendorong pertumbuhan bisnis di kedua negara.

KUNJUNGAN INTERNASIONAL

Menjajaki Peluang Kolaborasi: Kadin Indonesia Terima Audiensi Delegasi Startup Taiwan



Lanskap perusahaan rintisan (*start up*) di Indonesia dan Taiwan menunjukkan dinamika yang sangat menjanjikan bagi industri teknologi. Di Indonesia, startup lokal telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, terutama dari klaster e-commerce, fintech, dan lainnya. Menurut Startup Ranking, Indonesia merupakan salah satu negara dengan startup terbanyak di dunia pada awal 2024. Per Januari 2024 terdapat 2.562 startup di Indonesia. Jumlahnya paling banyak nomor satu di Asia Tenggara, peringkat ke-2 di skala Asia, dan peringkat ke-6 secara global. Sementara itu, Taiwan juga dikenal sebagai negara dengan inovasi teknologi yang tinggi, terutama dalam sektor *cybersecurity*, *smart city*, kesehatan digital dan *sustainability technologies*. Kedua negara ini memiliki potensi besar untuk saling melengkapi dan berkolaborasi.

Dalam rangka menjajaki potensi kerjasama, Kadin Indonesia menyambut kedatangan delegasi Startup Taiwan pada 8 Agustus 2024 di Menara Kadin. Acara ini merupakan bagian dari kunjungan kerja ASEAN Innovation Business Platform (AIBP) ke Indonesia dengan tema "*AIBP Global Connect: Opportunity to Meet with International Solution Providers*". Pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika, Firlie H. Ganinduto, dan Ketua Komite Jaringan Informatika, serta dihadiri oleh 30 delegasi startup Taiwan dari berbagai sektor, termasuk *Consumer and Retail Technologies*, *Cybersecurity*, *IR 4.0*, *Sustainability Technologies*, dan *Enterprise AI Applications*.



PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN

Wujudkan Emisi Nol Bersih, Kadin Indonesia bersama CarbonEthics dan Earth Security Tandatangani MoU untuk Pelestarian Mangrove

Wilayah pesisir dan tanaman mangrove memiliki peran vital dalam ekosistem pantai sebagai penyangga alami terhadap erosi, tempat tinggal bagi berbagai jenis fauna, serta penyerap karbon yang efektif. Namun, kawasan pesisir dan mangrove di Indonesia kerap kali menghadapi ancaman serius akibat pembangunan yang tidak berkelanjutan dan perubahan iklim. Menghadapi tantangan ini, langkah-langkah konkret dan kolaboratif sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan pesisir.



Sebagai bagian dari upaya untuk mendukung pengembangan pesisir dan pelestarian mangrove yang berkelanjutan, serta mencapai target emisi nol bersih, Kadin Indonesia mengambil langkah strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan CarbonEthics dan Earth Security. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi dan Luar Negeri, Shinta W. Kamdani, bersama Direktur PT Iklim Muda Sentosa (CarbonEthics), Agung Bimo Listyanu, serta Founder dan CEO Earth Security, Alejandro Litovsky, telah resmi menandatangani MoU pada di Menara Kadin Indonesia pada 7 Agustus 2024.



Dalam sambutannya, Shinta memaparkan bahwa kerja sama ini akan berfokus pada pengembangan program solusi berbasis alam, khususnya ekosistem mangrove. Mulai dari penelitian, penanaman, hingga pengembangan masyarakat di beberapa wilayah seperti; Tanjung Pinang, Tanjung Pakis dan Indramayu. Momentum ini merupakan bagian dari rangkaian acara menuju Indonesia International Sustainability Forum (ISF), yang akan diselenggarakan pada 5-6 September 2024.



Kelas #Business101: Mengasah Keterampilan Pemasaran Online

PRODUKSI

- ☐ BAHAN BAKU
- ☐ KUALITAS PRODUK
- ☐ EFISIENSI HARGA
- ☐ PENGADAAN MESIN/ PERALATAN PENUNJANG
- ☐ DLL

PEMASARAN

- ☐ PENINGKATAN PENJUALAN
- ☐ DISTRIBUSI PRODUK
- ☐ SEGMENTASI PASAR
- ☐ PROMOSI
- ☐ DLL

PERMODALAN

- ☐ BANKABLE
- ☐ KELAYAKAN USAHA
- ☐ JUMLAH KEBUTUHAN MODAL
- ☐ DLL



Rangkaian kelas dan pelatihan #Business101 UMKM Naik Kelas terus secara konsisten dilaksanakan dengan berbagai topik menarik dan relevan sesuai dengan kebutuhan UMKM. Memasuki sesi ke-8, kelas #Business101 mengangkat tema “Pemasaran Online”. Pelatihan yang diadakan secara daring pada 7 Agustus 2024 ini dihadiri oleh lebih dari 100 UMKM binaan Kadin Indonesia.

Dalam kesempatan ini, pimpinan dari Power Commerce Asia yang diwakili oleh Head of Sales Solution Tech dan Head of E-Commerce Operation memberikan paparan mendalam mengenai strategi berjualan di *e-commerce* bagi UMKM. Mereka berbagi berbagai jurus jitu yang dapat diterapkan oleh para peserta untuk meningkatkan penjualan mereka melalui *platform e-commerce*. Pemaparan ini mencakup berbagai aspek mulai dari teknik pemasaran digital, pengoptimalan toko online, hingga strategi menarik minat konsumen.

Kelas ini juga diharapkan dapat memberikan dorongan bagi para UMKM untuk lebih aktif berjualan melalui *e-commerce*, sehingga mampu memperluas pasar mereka dan meningkatkan omzet. Dengan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pemasaran online, para pelaku UMKM diharapkan dapat lebih kompetitif di pasar digital yang semakin berkembang.



Kadin Indonesia dan ICCD Adakan Rangkaian Lokakarya untuk Pengembangan Bisnis



Dalam rangka mendukung sektor swasta dan UMKM sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional, Kadin Indonesia melalui Bidang Hubungan Internasional berkolaborasi dengan Islamic Chamber of Commerce and Development (ICCD) menyelenggarakan rangkaian *workshop* (lokakarya) bertema "*Strategic Communication, Digital Marketing, and Membership*", serta "*How Chambers of Commerce can Provide Excellent Services to their Members in the Private Sector*" di Menara Kadin Indonesia, pada 19-21 Agustus 2024.



Lokakarya "*Strategic Communication and Digital Marketing and Membership*" diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan panduan komprehensif terkait komunikasi strategis, pemasaran digital, dan teknik untuk menjadi perwakilan bisnis yang andal. Acara ini mengajarkan peserta cara mengelola komunikasi yang efektif, pemanfaatan *digital marketing* untuk memperluas jangkauan pasar, serta strategi untuk meningkatkan keanggotaan dalam organisasi dan asosiasi.

Sementara itu, lokakarya dengan tema "*How Chambers of Commerce can Provide Excellent Services to their Members in the Private Sector*" difokuskan pada bagaimana Kadin Indonesia dan Kadin Daerah dapat menjadi perwakilan bisnis yang andal dan penggerak utama dalam menciptakan lingkungan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran nasional. Lokakarya ini memberikan panduan bagi asosiasi dan kamar dagang untuk meningkatkan layanan mereka kepada anggota di sektor swasta.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Bernardino M. Vega, perwakilan Kadin Provinsi, Asosiasi anggota Kadin, serta Sekretariat Kadin Indonesia. Melalui sesi-sesi interaktif dan materi mendalam, Kadin Indonesia berharap bahwa hasil dari lokakarya ini dapat memperkuat kapabilitas peserta dan mendukung inisiatif yang memperkuat sektor swasta serta UMKM, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.





SPECIAL SECTION: MUSYAWARAH PROVINSI VII KADIN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Musyawarah Provinsi VII Kadin Provinsi Kalimantan Barat: Sinergi Dunia Usaha Menuju Indonesia Emas 2045

Sesuai dengan ketentuan AD/ART organisasi dan dalam rangka memperkuat fondasi organisasi, mengevaluasi kinerja serta merumuskan program kerja yang tepat guna, Kadin Provinsi Kalimantan Barat menggelar Musyawarah Provinsi (Muprov) VII pada 9 Agustus 2024 di Hotel Ibis Pontianak. Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, bersama Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Eka Sastra, dan Wakil Ketua Umum Wilayah Kalimantan, Feri Rizal, turut menghadiri kegiatan ini.



Mengusung tema "Bersatunya Dunia Usaha Dalam Mendorong Peningkatan Ekonomi Daerah, Menuju Indonesia Emas 2045", Muprov ini menegaskan pentingnya sinergi antar pelaku usaha untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah sebagai bagian dan kontributor untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Kalimantan Barat memiliki potensi ekonomi yang luar biasa dengan kekayaan sumber daya alam yang meliputi pertambangan, kehutanan, perikanan, pertanian, dan perkebunan.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Kadin Indonesia menyampaikan, "Kadin Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi yang sangat signifikan untuk mendukung perekonomian daerah. Potensi yang ada tidak hanya membuka peluang lapangan kerja baru, tetapi juga memperkuat pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor strategis seperti kelautan, kehutanan, dan hilirisasi. Dengan memaksimalkan potensi-potensi ini, kita tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga mengambil langkah besar menuju pencapaian pertumbuhan ekonomi 8% dan visi Indonesia Emas 2045," ujar Arsjad.

Kegiatan ini juga sekaligus menandai terpilihnya Arya Rizqi Darsono sebagai Ketua Umum Kadin Provinsi Kalimantan Barat untuk periode 2024-2029 secara aklamasi. Arya Rizqi Darsono dalam visi dan misinya menegaskan komitmen untuk memperkuat peran Kadin di tingkat kabupaten/kota, mengoptimalkan pelayanan, serta memberdayakan lembaga non-struktural di seluruh Kalimantan Barat. Program kerja lima tahun ke depan akan difokuskan pada penguatan kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah daerah, guna memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata.

SPECIAL SECTION: MUSYAWARAH PROVINSI XIV KADIN PROVINSI DKI JAKARTA

Musyawarah Provinsi XIV Kadin Provinsi DKI Jakarta: Mengokohkan Peran Strategis dalam Mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global

Musyawarah Provinsi (Muprov) XIV Kadin Provinsi DKI Jakarta berlangsung pada 11 Agustus 2024 dan merupakan agenda penting dalam rangka memperkuat peran Kadin Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban, menetapkan program organisasi, dan memperbarui komitmen dalam memajukan perekonomian daerah, khususnya Jakarta. Muprov XIV Kadin Provinsi DKI Jakarta kali ini mengangkat tema “Peran Strategis Kadin dalam Mewujudkan Daerah Khusus Jakarta sebagai Kota Global”, yang menegaskan pentingnya Jakarta dalam lanskap ekonomi nasional dan internasional.

Acara ini resmi dibuka oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid dan turut dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi Yukki N. Hanafi, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Eka Sastra, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Dhaniswara K. Hardjono, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Juan Permata Adoe, Kepala Badan Pengembangan Ekosistem Perfilman dan Animasi, serta 12 Ketua Umum Kadin Provinsi lainnya.



Dalam sambutannya, Ketua Umum Kadin Indonesia menuturkan Kadin sebagai payung organisasi dan mitra pemerintah memiliki peran penting dalam memajukan perekonomian negara. “Sektor swasta juga berperan penting dalam perekonomian bangsa. Kadin harus bisa memaksimalkan potensi daerah yang selaras dengan pemerintah daerah. Ekonomi Jakarta juga tidak akan habis, mengingat Jakarta sebagai penyumbang terbesar ekonomi negara,” ungkap Arsjad. Beliau juga menambahkan, para pengusaha khususnya di Jakarta harus bisa menciptakan efek domino yang positif dan bisa menjadi role model untuk Kadin Provinsi lainnya.

Dalam Muprov ini, Diana Dewi kembali terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Provinsi DKI Jakarta untuk masa jabatan 2024–2029. Diana menegaskan bahwa Muprov Kadin Jakarta memiliki peran krusial untuk menghasilkan ide-ide dan inovasi baru untuk memajukan perekonomian Indonesia.

Ketua Umum Kadin Provinsi DKI Jakarta terpilih memaparkan fokus program kerja Kadin Jakarta untuk lima tahun ke depan yang mencakup bidang keorganisasian, kelembagaan dan anggota, informasi, kehumasan, telekomunikasi dan digitalisasi, koperasi dan UMKM, serta keuangan dan perbankan.



SPECIAL SECTION: RAPAT KOORDINASI WILAYAH KALIMANTAN

Penguatan Ekonomi Kalimantan dan ASEAN Melalui Rapat Koordinasi Wilayah Kalimantan 2024



Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Kalimantan menjadi platform strategis dalam rangka memperkuat kerjasama dalam pembangunan dan hubungan ekonomi di Kalimantan. Rangkaian kegiatan Rakorwil Kalimantan yang berlangsung pada 11-13 Agustus di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, mengangkat tema "Sinergi Pembangunan dan Penguatan Hubungan Ekonomi ASEAN di Kalimantan". Kegiatan ini sekaligus menjadi agenda pembahasan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat integrasi regional.



Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, Wakil Ketua Umum Wilayah Kalimantan Feri Rizal, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Bernardino M. Vega, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Juan Permata Adoe, dan Wakil Ketua Umum Bidang PUPR Insannul Kamil. Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua Umum Wilayah Kalimantan, Feri Rizal, menekankan pentingnya kolaborasi strategis di antara para pelaku usaha dalam mendukung inisiatif pembangunan regional. "Kegiatan ini merupakan upaya mendorong partisipasi pelaku usaha dalam penciptaan nilai bersama dan mengidentifikasi mekanisme yang efektif untuk integrasi usulan serta saran dari sektor swasta," ujar Feri.

Menurutnya, Kalimantan memiliki potensi besar untuk tumbuh menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendorong investasi di IKN. Diantaranya mengoptimalkan peran strategis sektor UMKM, mengembangkan konektivitas logistik, dan memperkuat infrastruktur.

Rakorwil Kalimantan ini sekaligus menjadi upaya konkret Kadin dalam memfasilitasi sinergi dan kerjasama antar pemangku kepentingan, terutama dalam pengembangan IKN. Dengan pelibatan usaha lokal yang lebih luas, diharapkan inisiatif ini tidak hanya mempercepat pembangunan IKN, tetapi juga membawa dampak ekonomi yang positif bagi seluruh wilayah Kalimantan.



SPECIAL SECTION: BORNEO ECONOMIC FORUM

Borneo Economic Forum 2024: Mewujudkan Potensi Kalimantan sebagai Pusat Ekonomi Baru dan Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN

Kadin Indonesia bersama ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC), dan Borneo Economic Community (BEC) berkolaborasi menggelar Borneo Economic Forum (BEF) yang berlangsung pada 13 Agustus 2024, di Hotel Rattan Inn Banjarmasin. Forum ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama dan pertumbuhan bersama di antara negara-negara ASEAN yang tergabung dalam Borneo Economic Community. Adapun BEF kali ini merupakan pertemuan ketiga yang diadakan untuk mendalami potensi dan mencari solusi pembangunan ekonomi yang lebih besar di Pulau Kalimantan, yang melibatkan Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Sebagai pulau terbesar ketiga di dunia, Kalimantan memiliki peran strategis yang semakin diperkuat dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). Kalimantan Selatan, sebagai gerbang utama, berperan penting dalam menghubungkan kawasan dengan negara tetangga. Kolaborasi yang terjalin melalui forum ini diharapkan dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan lewat penguatan hubungan antarnegara ASEAN.

Ketua Umum Kadin Indonesia yang sekaligus menjabat sebagai Ketua ASEAN BAC Indonesia Arsjad Rasjid, bersama Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Bernardino M. Vega, Ketua ASEAN BAC Brunei Darussalam Haslina Taib, serta ketua-ketua umum Kadin se-Kalimantan, turut hadir dalam forum ini. Dalam sambutannya, Arsjad Rasjid mengungkapkan bahwa Borneo, dengan PDB gabungan sekitar \$165 miliar, memiliki posisi strategis sebagai pusat integrasi ekonomi dan perdagangan regional. Kehadiran IKN Nusantara di Kalimantan Timur menjadikan Borneo sebagai salah satu episentrum pertumbuhan ekonomi, dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang didorong oleh pemerintah terpilih. Arsjad menekankan pentingnya kolaborasi ekonomi di Borneo, terutama dengan negara tetangga Malaysia dan Brunei, sebagai bagian dari kebijakan *"good neighbor policy"*.

Mengusung tema *"Regional Connectivity: A Pathway to Inclusive Growth"*, BEF 2024 membahas topik-topik utama seperti Borneo for Nusantara, Tri-City Economy for Three-Countries Connectivity, dan greater energy connectivity. Forum ini menjadi wadah untuk mendiskusikan peningkatan investasi ke IKN, mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di Kalimantan, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, dalam rangka mendukung visi Indonesia Emas 2045.



RAPIMPROV & FORUM BISNIS
Kadin Provinsi Maluku
Periode 2019-2024

SPECIAL SECTION: RAPIMPROV DAN FORUM BISNIS 2024 KADIN PROVINSI MALUKU

Rapimprov Kadin Maluku Fokus dalam Percepatan Investasi dan Pembangunan Infrastruktur

Dalam rangka memperkuat sinergi antara Kadin se-Provinsi Maluku, dunia usaha dan pemerintah daerah guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Kadin Provinsi Maluku menggelar Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) dan Forum Bisnis 2024 di Hotel Santika Premiere, Kota Ambon, pada 24 Agustus 2024. Mengusung tema "Provinsi Kepulauan, Pembangunan Infrastruktur dan Peran Dunia Usaha Dalam Mendorong Investasi, Percepatan Pembangunan dan Ekonomi Maluku," Rapimprov ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan visi pembangunan Maluku ke depan.



Ketua Umum Kadin Provinsi Maluku, M.A.S. Latuconsina, dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi dan kontribusi dunia usaha dalam pembangunan Maluku, yang masih menghadapi tantangan besar seperti kemiskinan dan pengangguran. Forum Bisnis yang digelar bersamaan dengan Rapimprov ini bertujuan untuk memperkuat eksistensi Kadin Maluku serta memberikan masukan strategis bagi pembangunan daerah. Selain itu, forum ini diharapkan mampu menarik investasi dan memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha serta pembangunan ekonomi di Maluku.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar Rapimprov Kadin Maluku dapat menjadi ajang sinkronisasi dan penguatan sinergi antara Kadin Maluku, Kadin Indonesia, dan dunia usaha. Arsjad menekankan pentingnya kolaborasi yang erat dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, khususnya bagi provinsi kepulauan seperti Maluku yang membutuhkan pendekatan pembangunan yang spesifik dan inklusif.

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Yukki N. Hanafi, serta Wakil Ketua Umum Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang turut hadir dalam kegiatan ini. Rangkaian kegiatan ini juga mencakup penyerahan Buku Indonesia Emas 2045 kepada perwakilan Gubernur Maluku dan Forkopimda, serta pelaksanaan Forum Bisnis yang menghadirkan berbagai narasumber. Di sela Rapimprov, Kadin Provinsi Maluku juga menggelar pameran UMKM binaan Kadin guna memperlihatkan komitmen terhadap pengembangan ekonomi lokal.



Langkah Nyata Kadin Indonesia untuk Emisi Nol Bersih: Jalin Kerja Sama Dekarbonisasi dengan AZEC

Kadin Indonesia bersama ASEAN-BAC menegaskan komitmennya dalam mendukung dekarbonisasi dan transisi energi melalui kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta. Langkah ini diwujudkan melalui keikutsertaan kedua belah pihak dalam Asian Zero Emission Community (AZEC) 2nd Ministerial Meeting & Advocacy Group Roundtable, yang menjadi tindak lanjut dari penandatanganan MoU pada KTT 50 Tahun ASEAN-Jepang di Tokyo.

Acara ini berlangsung selama dua hari, 20-21 Agustus 2024, di Jakarta. Pada hari pertama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, hadir sebagai narasumber di sesi AZEC Advocacy Group Roundtable. Ketua Umum Kadin Indonesia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara komitmen menuju nihil emisi dengan potensi pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia, khususnya mengingat pergeseran pertumbuhan global ke wilayah ini. Menurutnya, Indonesia sudah memiliki komitmen kuat untuk mencapai ekonomi net-zero pada tahun 2060, atau bahkan lebih cepat.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Kadin Indonesia juga menegaskan bahwa pendekatan global terhadap transisi energi harus mempertimbangkan kebutuhan energi serta kondisi ekonomi di setiap negara. Ia menekankan pentingnya ketahanan energi, yang tidak hanya mendukung sektor industri, tetapi juga memberikan akses bagi masyarakat terhadap layanan penting seperti kesehatan dan pendidikan, sekaligus membuka peluang ekonomi baru.

AZEC Advocacy Group Roundtable merupakan bagian dari inisiatif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Keidanren, ASEAN Business Advisory Council, dan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA). Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, seperti President ERIA, Tatsuya Watanabe, Managing Director Japan Business Federation (Keidanren), Arihiro Iwamura, Ketua ASEAN-BAC 2024, Oudet Souvannavong, serta beberapa pimpinan Kadin Indonesia seperti Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Bernardino Vega, Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan Dan Perikanan Joseph Pangalila dan Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Bambang Brodjonegoro.



Lembaga Mediasi Sengketa Bisnis Kadin Indonesia adalah fasilitas hukum organisasi yang memberikan manfaat bagi anggota Kadin dalam penyelesaian sengketa bisnis.

Beberapa Jenis Layanan yang diberikan oleh Kadin Indonesia



Manfaat Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Mediasi Sengketa Bisnis Kadin Indonesia



Cara Mendapatkan Layanan



Untuk Informasi Lanjutan
Silahkan Hubungi:

Hotline Kadin Indonesia

+62-811-9631-0204



**Urgensi untuk melakukan
pengkinian data bagi pengurus
Kadin Indonesia**

Silakan cek **WhatsApp Hotline
(0895-6113-40500)** atau **Email** Bapak/Ibu
Pengurus, Segera Akses Link untuk Lakukan
Pengkinian Data

MANFAAT

Keanggotaan **Kadin**

Nikmati ragam keuntungan dan manfaat dengan menjadi bagian dari **keanggotaan Kadin Indonesia**



Update terhadap
Perkembangan Ekonomi
dan **Bisnis**



Dukungan dalam
Penerapan **Net Zero**



Dukungan **Advokasi**



Kemudahan **Pembuatan**
Surat Keterangan



Scaling up skill/
Kemampuan Wirausaha
dan Pekerja



Akses terhadap **Market**



Tumbuhkan Bisnis melalui
Network dan **Kolaborasi**



Dukungan terhadap
Transformasi Digital



Kesempatan **Promosi**



Potongan Harga Menarik
dari Mitra-Mitra Kadin



Terlibat dalam
Penyusunan Kebijakan
Industrial

CARA PENDAFTARAN Anggota Kadin



Scan QR Code atau
kunjugi **anggota.kadin.id**



1 Klik **"Daftar Anggota"**, lalu pilih jenis keanggotaan



2 Membuat akun dengan mendaftarkan **email** dan **NIK**



3 Menerima notifikasi pendaftaran akun dari **info.anggota@kadin.id**



4 Masuk dengan akun yang didaftarkan



5 Lengkapi formulir dengan data yang diperlukan

Persyaratan yang dibutuhkan

- ✓ Email Penanggung Jawab
- ✓ NIB Perusahaan
- ✓ AKTA Perusahaan
- ✓ NPWP Perusahaan
- ✓ KTP Direksi
- ✓ Foto Pass Direksi
- ✓ No HP Penanggung Jawab



6 Menerima notifikasi dan unduh invoice pembayaran



7 Melakukan pembayaran ke rekening/ virtual account yang tertera di invoice



8 Menerima notifikasi keanggotaan terdaftar dari **info.anggota@kadin.id**



9 Download **KTA-B**, Anda telah resmi menjadi anggota Kadin

CARA MEMPERPANJANG KEANGGOTAAN KADIN

Hotline Keanggotaan
0813 8862 8081 | 0813 9830 2790



Kunjugi **anggota.kadin.id**



Masukan Email dan kata sandi, lalu klik **"Masuk"**



Klik menu **"KTA"**, lalu klik menu **"Perpanjang KTA"**



Menerima notifikasi perpanjangan keanggotaan dan invoice dari **info.anggota@kadin.id**



Melakukan pembayaran ke rekening/virtual account yang tertera di invoice



Menerima notifikasi keanggotaan terdaftar dari **info.anggota@kadin.id**



Download **KTA-B**, Anda telah memperpanjang keanggotaan Kadin

FITUR TERBARU

Website **Kadin.id**



Forum Anggota Kadin

Dibuat sebagai tempat **berbagi informasi** seputar bisnis, *networking*, dan diskusi interaktif seputar perkembangan dunia usaha. Forum Anggota Kadin dikelola oleh Sekretariat Kadin Indonesia sebagai administrator.

Layanan Kadin



Halaman-halaman yang menonjolkan **layanan sekretariat** dan **manfaat keanggotaan**

Info Advokasi Kadin



Tempat untuk menghimpun informasi mengenai **perkembangan advokasi terkini** yang dilakukan oleh Kadin

Akselerasi Transisi Energi, TKDN Proyek EBT Disiapkan

Sumber: Hukumonline.com

Kementerian ESDM sedang mempersiapkan Peraturan Menteri ESDM baru yang mengatur tingkat komponen dalam negeri (TKDN) proyek energi baru dan terbarukan (EBT). Rancangan peraturan tersebut sudah ada pada tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan Rancangan Permen ESDM ini nantinya akan menjadi acuan dalam pengaturan nilai minimum TKDN untuk gabungan barang dan jasa pada proyek infrastruktur ketenagalistrikan. "Sudah melalui proses harmonisasi dan posisi saat ini sudah ke Kemenkumham," ucapnya saat dihubungi Hukumonline.

Eniya menjelaskan pembentukan Permen ESDM terbaru ini ditujukan untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur dalam upaya transisi energi khususnya pada ketenagalistrikan. Aturan tersebut menyebutkan tentang ketentuan TKDN untuk gabungan barang dan jasa pada proyek EBT sehingga diharapkan dapat mempermudah investasi bagi proyek EBT. Selain kemudahan masuknya investasi, Permen ESDM terbaru ini akan mengatur mengenai ketentuan hibah luar negeri atas komponen penting yang berdampak pada proyek EBT.

Menurut Eniya, ketentuan TKDN ini akan berlaku terhadap barang dan jasa suatu proyek EBT yang dihitung sejak Feasibility Study (FS), Front End Engineering Design (FEED), Detailed Engineering Design (DED), pembangunan konstruksi, hingga layanan. Reward and Punishment juga turut diatur bagi proyek yang mampu ataupun gagal dalam memenuhi tingkat minimum TKDN yang sudah diatur. Sanksi yang disiapkan berupa peringatan hingga pencabutan izin.

Terkait dengan gambaran seberapa besar persentase TKDN yang diperlukan dalam sebuah proyek EBT, Eniya memastikan akan ada aturan tersendiri. Keputusan Menteri ESDM akan jadi rujukan mengenai besar ambang batas yang diperlukan dalam suatu proyek EBT.

"Angka threshold sendiri akan diatur di Kepmen ESDM terpisah," jelasnya.

ANALISIS HUKUM

Secara umum, besaran nilai TKDN yang saat ini berlaku untuk infrastruktur ketenagalistrikan telah ditetapkan oleh Menteri Perindustrian melalui **Peraturan Menteri Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan**, sebagaimana terakhir diubah melalui Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2023 (Permenperin 54/2012). Dalam batang tubuhnya, Permenperin 54/2012 juga mencakup besaran nilai TKDN barang dan jasa infrastruktur ketenagalistrikan EBT sebagai berikut: 1) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); 2) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); 3) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); dan 4) Jaringan Transmisi, Gardu Induk, dan Jaringan Distribusi Listrik. Sebagai contoh, Pasal 13B Permenperin 54/2012 menetapkan melalui amendemen terakhirnya, bahwa mulai 1 Januari 2025, nilai TKDN barang minimal yang ditetapkan untuk modul surya PLTS terpusat terhubung adalah 60%.

Apabila penyedia barang/jasa pada pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tidak memenuhi besaran nilai TKDN yang ditetapkan pada Pasal 27 Permenperin 54/2012, penyedia dapat dikenakan sanksi administratif dalam bentuk peringatan tertulis atau dimasukkan dalam black list selama dua tahun. Secara spesifik apabila nilai TKDN hasil verifikasi self assessment pada akhir proyek lebih kecil dari nilai TKDN yang diperjanjikan, penyedia juga dapat dikenakan sanksi finansial paling tinggi sebesar 10% dari nilai kontrak.

REKOMENDASI TINDAKAN

Bagi pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa terkait proyek infrastruktur EBT, penting untuk segera menyiapkan strategi memenuhi TKDN dengan memperkuat keterlibatan komponen lokal dalam proyek, sambil memantau perkembangan peraturan ini dan merencanakan penyesuaian sesuai ketentuan baru yang akan ditetapkan oleh Kepmen ESDM terkait ambang batas TKDN.



Sekilas Tentang Kadin for Naker

Kadin for Naker hadir dalam bentuk **platform digital** untuk memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang dapat diakses oleh seluruh tenaga kerja di Indonesia dari berbagai sektor dan industri sekaligus menjadi platform link & match antara tenaga kerja dengan kebutuhan industri.

Kadin for Naker merupakan **program pengembangan kapasitas** inisiatif Kadin Indonesia bersama dengan Serikat Buruh di Indonesia dan didukung oleh Pijar Foundation.

Manfaat Kadin for Naker untuk Pekerja

-  Materi pembelajaran yang dapat diakses **kapan saja**
-  Materi yang disesuaikan dengan **kebutuhan industri**
-  Lowongan kerja dari perusahaan yang **terverifikasi**

Manfaat Kadin for Naker untuk Perusahaan

-  Sarana **peningkatan kualitas SDM** bagi perusahaan
-  **Keterampilan pekerja** yang terverifikasi
-  Peningkatan kapasitas pekerja untuk kinerja yang **lebih optimal**
-  Pencarian tenaga kerja berdasarkan **kompetensi** yang dicari

Kategori Kelas di Kadin for Naker

Mencari Pekerjaan

Pengembangan Diri

Mencari Pendapatan Tambahan

Program Komputer

Bahasa

Keterampilan Industri Spesifik

Tata Cara Mendaftar Kadin for Naker





Wiki Export adalah platform pengembangan UMKM berbasis website dan AI chatbot. Wiki Export memiliki misi untuk meningkatkan kontribusi ekspor UMKM dengan membuat UMKM Indonesia siap export melalui pemberian informasi, pelatihan dan sertifikasi.

Solusi WikiExport



Informasi terkurasi melalui
Website



Pelatihan berbasis
video



Layanan 24 Jam berbasis
chatbot



Kursus & sertifikasi
melalui workshop



"Melalui proses Business Matching, kami merasakan manfaat yang luar biasa, bisa bertemu dengan calon-calon partner di Jepang yang sudah terkurasi oleh Wiki Export bersama JETRO. Dengan memanfaatkan network yang ada di dalam Kadin, saya berharap proses ini dapat berlangsung secara berkelanjutan. Saya yakin sekali UMKM itu tidak hanya kuat di Indonesia, tapi justru bisa relevan di dunia"

Irvan Helmi
Co-Founder Pipiltin Cocoa

Mari bergabung dan dapatkan akses ke pelatihan, pendampingan, dan berbagai akses informasi yang dirancang untuk membantu usaha Anda menembus pasar internasional.



Daftar ke wikiexport@kadin.id
Menara Kadin Indonesia Lt. 3
Jl. H. R. Rasuna Said X-5, Kav 2-3,
Jakarta 12950

“Menuju Ekosistem Bisnis yang Berkelanjutan”

NZH adalah sebuah inisiatif dari dunia usaha untuk mencapai *Net Zero Emission* di Indonesia. Bersama Kadin, mari wujudkan komitmen perusahaan anda menuju *Net Zero*, melalui:

Science Based Emission

Emission Reduction

Climate Mitigation

Climate Adaptation

Daftar sekarang juga ke

secretariat@netzerohub.id

Menara Kadin Indonesia Lt.29
Jl. H. R. Rasuna Said X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950



EKSPOR BARANG ANDA KE SELURUH DUNIA MELALUI TRADE

TRADE adalah platform Sentra Layanan Dokumen Elektronik KADIN Indonesia yang membantu pembuatan dokumen ekspor seperti *COO*, *Certificate of Export Goods*, *Certificate of Free Sale*, serta legalisir dokumen ekspor dengan mudah dan cepat.

Tahapan-tahapan untuk membuat dokumen ekspor:



Klik **Masuk** atau **Daftar** untuk masuk maupun mendaftar akun.

Masukkan alamat email dan password. Jika belum memiliki akun, dapat mendaftar terlebih dahulu dengan klik **Daftar**.



Pilih **Document Registration** untuk melengkapi data-data mengenai perusahaan.



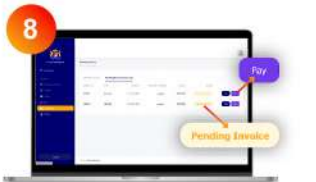
Lengkapi data-data dan unggah dokumennya, lalu klik **Save Changes**.



Pilih **Create COO** lalu pilih form yang sesuai kebutuhan dengan klik **Create**



Isi form dengan melengkapi data Itinerary dan Goods Item dan unggah dokumennya.



Setelah selesai mengisi form, tunggu beberapa saat hingga status berubah dari **Waiting for Approval** menjadi **Waiting for Payment**. Lalu buka menu **Transaction**, pilih **Pending Transaction**, lalu klik **Pay**. Kemudian lakukan pembayarannya menggunakan **virtual account** yang tertera.



Setelah pembayaran dilunaskan, COO **Siap Dicetak** dan digunakan.

Untuk informasi lebih lanjut,
hubungi **Help desk**:

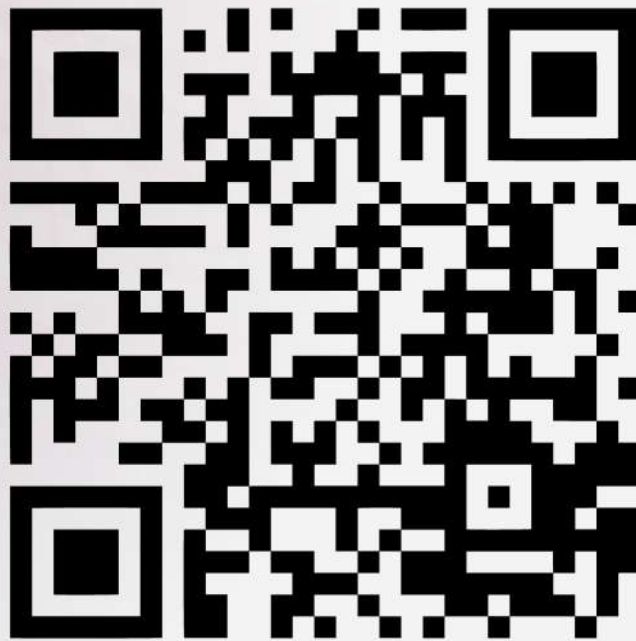
☎ +62 882-1975-0620 (LEO) ☎ +62 882-9208-4913 (ALDI)



SCAN QR
ATAU KUNJUNGI
edocs.kadin.id/



Mari menjadi bagian dari **ekosistem bisnis Indonesia** dengan bergabung Kadin Indonesia



tinyurl.com/pendaftarananggotakadin



Program-Program Kadin Indonesia Telah
Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Jadilah Bagian Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional Sebagai Sponsor Kadin Indonesia



Kegiatan Utama Kadin Indonesia 2024



Hari Ulang Tahun
Republik Indonesia
17 Agustus



Hari Ulang Tahun
Kadin Indonesia
24 September



Rapimnas
Kadin Indonesia
Q4 2024



Kadin Impact Award
Sepanjang Tahun
2024



Quarterly Regulatory
Outlook 2024



Quarterly Policy
Outlook 2024

Informasi lanjutan tentang kerja sama dan
kolaborasi dapat menghubungi

Andri (+62 8560 306 7593)

Terbangkan Potensi Ekonomi Bersama, Mencapai Visi Indonesia Emas 2045!



Kadin Indonesia dan Garuda Indonesia berkolaborasi untuk memberikan **kemudahan** dan **kenyamanan** bagi seluruh anggota Kadin Indonesia, dalam melakukan **perjalanan udara** di dalam maupun luar negeri

Manfaat yang dapat diperoleh Anggota Kadin Indonesia

POTONGAN HARGA

UP TO **20%**

Rute Internasional

POTONGAN HARGA

3%

Rute Domestik

POTONGAN HARGA

UP TO **20%**

Rute Middle East

POTONGAN HARGA

UP TO **20%**

Rute Interline

Kemudahan lain yang dapat dimiliki Anggota Kadin Indonesia



Memiliki ekstra bagasi
hingga **5 kilogram**



Mendapatkan kemudahan
program MICE jika bepergian
dalam kapasitas 100 orang



Memiliki **akses check-in**
pada **counter khusus**



Mendapatkan **staf sales khusus**



Segera daftarkan dirimu menjadi
Anggota Kadin Indonesia dan nikmati
manfaat untuk melakukan perjalanan bersama

Garuda Indonesia

Nikmati Benefit Eksklusif sebagai Anggota Kadin Indonesia bersama Hyundai!

Optimalkan mobilitas bisnis Anda dengan **potongan** harga istimewa dari Kadin Indonesia x Hyundai hingga **50 juta rupiah***



IONIQ 5



IONIQ 6

Mobil Listrik



Santa Fe



Stargazer



Creta



Palisade



Staria

Mobil Non-Listrik

Tata cara pembelian:

1. Hubungi nomor Kadin Indonesia yang tertera untuk melakukan verifikasi anggota aktif Kadin Indonesia yang telah memiliki KTA-B
2. Setelah melakukan verifikasi, pihak Hyundai Indonesia akan segera menghubungi Anda untuk melanjutkan proses transaksi

* Potongan harga berbeda-beda untuk masing-masing jenis mobil

Informasi lebih lanjut hubungi:

+62 813-8801-2200
(Kadin Indonesia)



KADIN INDONESIA



Informasi lanjutan terkait **pasar internasional** dapat ditemukan di sini:

bsd-kadin.id



Temukan informasi menarik bagi **pengembangan bisnis UMKM** di sini:

wikiexport.ai



Temukan layanan **pengurusan dokumen dagang** di sini:

trade.kadin.id



Ikut bergabung dalam ekosistem **bisnis berkelanjutan** di sini:

netzerohub.id



Kembangkan kapasitas dan kesempatan meningkatkan **jenjang karir** di sini:

kadinforaker.id

Disusun oleh
Humas Sekretariat Kadin Indonesia

Kadin Indonesia

Menara Kadin Indonesia Lt. 3, 24, 29, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 | Telp. 021-5274484